



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARKUS**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN TATA USAHA PADA FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN**
3. NHK : **968325**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.228.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/255 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 195.000.000
3. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
4. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA BANGKALAN, HASIL SENDIRI Rp. 343.500.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/157 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **255.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA 2.4 V Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA X1N02Q43L0 A/T Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, HONDA NC11BF1D A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **98.100.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	150.212.116
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.731.812.116
III. HUTANG	Rp.	741.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.990.812.116

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.